Tindakan Persetubuhan Mayat Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP

Sabina Salsabila^{1*}, Rio Armanda Agustian², Toni³, Adhika Adriansyah⁴

^{1,2,3,4}Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung, Pangkalpinang, Indonesia

Email: ^{1*}sabinasalsabila6860@gmail.com, ²toni.qudama@gmail.com, ³adriansyahadhika5@gmail.com

(* : coresponding author)

Abstrak – Penelitian ini hendak membahas tentang tindakan persetubuhan terhadap mayat jika ditinjau dari UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Tindakan persetubuhan terhadap mayat seringkali tidak menjadi perbuatan yang dipertimbangkan dalam memutuskan suatu perkara oleh hakim. Perbuatan pelaku yang diadili hanya perbuatan yang ada bersamaan dengan persetubuhan terhadap mayat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan pasal 271 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP pada pelaku persetubuhan terhadap mayat ditinjau dari teori perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana serta untuk mengetahui dan menganalisis metode interpretasi terkait tindakan persetubuhan terhadap mayat ditinjau dari UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Metode dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan persetubuhan terhadap mayat dalam kasus yang dibahas merupakan suatu tindak pidana khususnya termasuk ke dalam tindak pidana memperlakukan jenazah secara tidak beradab dikarenakan telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana ketentuan yang tertuang dalam pasal 271 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP sehingga kepada pelakunya dapat dikenakan pidana berupa pidana penjara maksimal 2 tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.

Kata Kunci: Tindak Pidana Gangguan Terhadap Pemakaman dan Jenazah, Persetubuhan Mayat, Mayat

Abstract – This study wants to discuss the act of sexual intercourse with corpses when viewed from Law No. 1 of 2023 concerning the Criminal Code. The act of sexual intercourse on a corpse is often not considered in deciding a case by the judge. The perpetrator's actions are only acts that exist at the same time as sexual intercourse with a corpse. This study aims to find out and analyze the application of article 271 of Law No. 1 of 2023 concerning the Criminal Code to perpetrators of sexual intercourse on corpses from the theory of unlawful acts in criminal law and to find out and analyze interpretation methods related to acts of sexual intercourse against corpses reviewed from Law No. 1 of 2023 concerning the Criminal Code. The method in this study is normative juridical. The approach in this study uses a statue approach and a conceptual approach. The results of study show that the act of sexual intercourse with a corpse in the case discussed is a criminal act, especially included in the criminal act of treating a corpse uncivilly because it has fulfilled the elements as stated in article 271 of Law No. 1 of 2023 concerning the Criminal Code so that the perpetrator can be subject to a criminal penalty in the form of a maximum prison sentence of 2 years or a maximum fine of category III.

Keywords: Crimes of Disturbing Funerals and Corpses, Sexual Intercourse With Corpses, Corpses

1. PENDAHULUAN

Masalah kejahatan dalam masyarakat mempunyai gejala yang sangat kompleks dan rawan serta senantiasa menarik untuk dibicarakan.¹ Tipe dan bentuk kejahatan yang dilakukan oleh manusia terus berkembang dari waktu ke waktu seiring dengan perkembangan zaman. Kejahatan terus mengalami perkembangan yang bukan hanya pada bentuk dan tipe kejahatannya, tetapi juga motif dan faktor penyebab dari dilakukannya suatu kejahatan. Perkembangan tipe dan bentuk kejahatan yang dilakukan oleh manusia terus mengalami perubahan pola, motif dan metode, serta mulai dari yang sederhana hingga yang rumit bahkan sangat keji.² Salah satu kejahatan yang marak terjadi di Indonesia adalah kejahatan terhadap mayat.

Mayat termasuk kepentingan hukum yang perlu dijaga dan dihormati di Indonesia sebagaimana yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP khususnya dalam ketentuan Pasal 268 - 271 yang mengatur tentang tindak pidana gangguan terhadap pemakaman dan jenazah.

¹ Nursariani Simatupang dan Faisal, *Kriminologi*, Pustaka Prima, Medan, 2017, hlm. 43.

² Ridwan Arifin dan Arsitasi Dewi Fatasya, *Kajian Hukum Atas Pembunuhan Berencana Yang Disertai Penganiayaan dan Mutilasi (Studi Atas Kasus-Kasus Mutilasi Kontroversi Di Indonesia)*, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 8, No. 1, 2019, hlm. 8.

Aturan tersebut membuktikan bahwa hukum tidak hanya memberikan perlindungan terhadap kehormatan individu yang masih hidup, tetapi juga kepada mereka yang telah meninggal dunia. Prinsip ini sejalan dengan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang secara esensial menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak atas perlindungan, termasuk nama baik individu yang sudah meninggal.

Salah satu bentuk kejahatan terhadap mayat yang mulai marak terjadi di Indonesia adalah perbuatan persetubuhan terhadap mayat atau yang disebut *nekrofilia*. *Nekrofilia* merupakan bagian dari penyimpangan seksual dari kodrat manusia yang disebut *Paraphilia*. *Paraphilia* adalah penyimpangan seksual yang dilakukan seseorang yang memiliki kelainan secara seksual.³ Menurut **Kowland Hawary**, ada banyak jenis penyimpangan seksual yang terjadi di mana terbagi menjadi, kelainan untuk bersetubuh dengan anak (*Pedophilia*), kelainan untuk bersetubuh dengan hewan (*Zoophilia*), LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender), kelainan untuk bersetubuh dengan mayat (*Necrophilia*) dan lainnya.⁴

Nekrofilia sendiri merupakan penyakit kelainan berupa tertarik secara seksual untuk menyetubuhi mayat, orang yang berhubungan seks dengan mayat, dan rasa tertarik yang abnormal terhadap mayat.⁵ *Nekrofilia* juga merupakan kelainan hasrat dalam tubuh manusia karena tertarik untuk bercinta dengan tubuh orang meninggal. Pertama kali, istilah di atas muncul sekitar tahun 1850 dalam studi keilmuan. Menurut sejarah, yang pertama memunculkannya adalah **Joseph Guislain**, seorang ahli kejiwaan asal Belgia. Penyebab *nekrofilia* beragam dan kebanyakan dialami oleh mereka yang memiliki trauma terhadap hal tertentu, seperti trauma karena pernah menjadi korban kekerasan seksual pada masa kecilnya.

Beberapa kondisi di atas juga memengaruhi perasaan pelaku nekrofilia yaitu takut ditolak pasangan, menginginkan pasangan yang tak akan bisa menolaknya, atau kekhawatiran untuk meninggal dunia. Kebanyakan pelaku cenderung pergi ke sebuah kuburan untuk mencari mayat atau beberapa diantaranya menggunakan metode pencurian mayat untuk memuaskan hasrat seksualnya. Bahkan pelaku akan membunuh seseorang yang kemudian akan disetubuhi mayatnya demi memenuhi hasrat seksualnya. Menurut **Jonanthan Rosman dan Philip Resnick**, adapun penyebab *nekrofilia* sendiri berdasarkan kasus yang pernah terjadi yaitu 68% pelaku menginginkan pasangan yang tidak dapat melawan, 21% menginginkan terus bersama dengan pasangan yang telah meninggalkan, 15% tertarik secara seksual dengan mayat, 15% kenyamanan, dan 11% guna memperbaiki harga diri dengan menguasai mayat.⁶

Masyarakat Indonesia pernah dihebohkan dengan kasus penemuan mayat yang sudah tergeletak di luar makamnya dalam kondisi telanjang di Kabupaten Deli Serdang. Dalam kasus tersebut, diketahui bahwa mayat gadis SMP yang baru dimakamkan selama 1 hari itu disetubuhi orang dua orang pria. Hal ini cukup mengundang pro kontra masyarakat mengingat pelaku tidak hanya membongkar makam, tetapi juga menyetubuhi mayat yang ada di dalam makam tersebut. Namun, penyidik tidak melanjutkan proses hukum terhadap pelaku karena dianggap tidak memiliki motif yang jelas. Selain itu, hal ini juga dikarenakan tidak adanya aturan normatif yang mengatur secara eksplisit terkait perbuatan persetubuhan terhadap mayat. Hal ini menyebabkan seringkali perbuatan tersebut diabaikan dalam proses hukum yang berjalan.

Berdasarkan ketentuan hukum pidana di Indonesia saat ini, perbuatan persetubuhan yang tergolong dalam tindak pidana kesusilaan dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP diatur dalam Pasal 411 yang hanya sebatas melarang perbuatan persetubuhan terhadap manusia yang masih hidup

³ Kowland Hawary, *Gagasan Pemidanaan Terhadap Pelaku Kejahatan Perkosaan Mayat (Nekrofilia) Dalam Hukum Positif Indonesia*, Jurnal Online Mahasiswa, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol.1, No. 2, 2019, hlm. 2.

⁴ *Ibid.*

⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, PT Gramedia Utama, Jakarta, 2012.

⁶ Jaymin Choolert, *Problem about the Enforcement on the Act of Sexual Penetration and Sexual Conduct: Study in Causes of Schizophrenia, The Type of Sexual Encounter with a Corpse*, Nitipat Law Journal, National Institute of Development Administration, Vol. 10, No.1, 2021, hlm. 52.

dan korban atau pelaku bisa berjenis kelamin perempuan maupun laki-laki serta merupakan delik aduan. Sedangkan, Pasal 415 melarang perbuatan cabul terhadap seseorang yang bisa saja berjenis kelamin baik laki-laki, perempuan atau anak yang diketahui dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya. Tidak berdaya tidak dapat diartikan sebagai seseorang yang telah mati. Oleh karena itu, perbuatan persetubuhan terhadap mayat memang tidak diatur dalam ketentuan tindak pidana kesusilaan di atas.⁷

Terhadap perbuatan yang dilarang kepada mayat atau jenazah, sebenarnya telah diatur dalam Pasal 271 KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP). Ketentuan tersebut menyebutkan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum menggali atau membongkar makam, mengambil, memindahkan, atau mengangkut jenazah, dan/atau memperlakukan jenazah secara tidak beradab dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III⁸. Frasa “memperlakukan jenazah secara tidak beradab” merupakan keniscayaan untuk menjangkau tindakan persetubuhan terhadap mayat. Hal ini dapat dilihat dengan membedah satu-persatu unsur-unsur yang terkandung di dalam pasal 271 tersebut dan dikaitkan dengan konteks perbuatan pelaku nekrofilia beserta dengan bukti-bukti yang ditemukan.

Namun, perlu digarisbawahi bahwa apabila merujuk pada penjelasan ketentuan yang ada dalam Pasal 270, maka makna mayat atau jenazah pada Pasal 271 tersebut diartikan sebagai orang yang sudah mati dan sudah dikubur.⁹ Oleh karena itu, persetubuhan terhadap mayat menurut aturan ini hanya bisa melingkupi pada perbuatan persetubuhan yang telah dilakukan terhadap mayat yang sudah di kubur. Akan tetapi, penulis tidak sependapat dengan pemaknaan mayat atau jenazah menurut undang-undang ini, yang seharusnya juga diartikan meliputi mayat atau jenazah yang belum dikubur. Seharusnya, hukum hadir untuk memberikan perlindungan kepada seseorang yang telah meninggal dalam kondisi apapun sebagai perwujudan untuk mencapai ketertiban dan keamanan dalam kehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti akan membuktikan dengan pertimbangan-pertimbangan teori dan normatif bahwa perbuatan nekrofilia merupakan sesuatu yang dapat dikatakan sebagai tindak pidana dan kepada pelakunya dapat dikenakan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 271 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP sehingga pelaku nekrofilia tidak lagi mudah untuk lolos dari jerat hukum dan mendapatkan efek jera atas perbuatannya.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis nomatif yaitu penelitian hukum yang digunakan untuk mengkaji norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang yaitu bagaimana penerapan dari Pasal 271 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP terhadap pelaku tindakan persetubuhan terhadap mayat. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan mengkaji penerapan Pasal 271 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP terhadap tindakan persetubuhan terhadap mayat dan pendekatan konseptual dengan mengkaji penerapan teori dan doktrin dalam ilmu hukum terkait tindakan persetubuhan terhadap mayat. Peneliti ini juga menggunakan bahan hukum primer yaitu UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan bahan hukum sekunder yaitu buku, jurnal, pendapat para pakar hukum dan sumber-sumber kredibel lainnya untuk menunjang penelitian ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyimpangan seksual semakin berkembang jenis dan bentuknya mengikuti perkembangan zaman. Salah satu bentuk perilaku penyimpangan seksual yang mengkhawatirkan masyarakat adalah persetubuhan terhadap mayat. Dalam hal ini, seseorang menunjukkan kecenderungan seksual

⁷ Elza Deswira Pratiwi dan Gelar Ali Ahmad, *Analisis Yuridis Tindakan Perkosaan Terhadap Jenazah di Indonesia*, Novum: Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya, In Press SPK 20, 2024, hlm. 135.

⁸ Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hlm. 89.

⁹ Penjelasan Atas UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hlm. 62.

terhadap individu yang sudah meninggal.¹⁰ Sebagai salah satu perilaku seksual yang menyimpang, nekrofilia telah mendapat perhatian dari kalangan masyarakat luas. Hal ini disebabkan karena tidak adanya pengaturan yang jelas mengenai nekrofilia di Indonesia. Selain itu, pengertian dari nekrofilia sendiri menimbulkan banyak tafsir mengingat belum dideskripsikan secara jelas. Akan tetapi, nekrofilia tidak lagi menjadi hal yang asing bagi masyarakat di Indonesia. Hal ini disebabkan karena kasus mengenai nekrofilia telah banyak terjadi di Indonesia.

Berikut beberapa contoh kasus persetubuhan terhadap mayat yang pernah terjadi di Indonesia sebagai berikut:

1. Seorang pelaku bernama Baekuni alias Bungkih alias Babe. Perbuatan pelaku akhirnya terungkap saat pelaku ditangkap dan diproses secara hukum setelah membunuh anak laki-laki bernama Ardiansyah. Pelaku diketahui membunuh Ardiansyah karena korban menolak untuk melakukan hubungan badan atau bersetubuh melalui anus atau sodomi. Hal tersebut membuat pelaku marah dan mengambil tali rafia untuk menjerat leher korban hingga tidak bernyawa. Setelah menyelesaikan aksinya, mayat korban disetubuhi oleh pelaku dengan cara disodomi. Lalu, pelaku memutilasi tubuh korban dan membuangnya secara acak di tempat berbeda.¹¹
2. Seorang pendeta bernama Henderson Sembiring berjenis kelamin laki-laki terbukti telah menyetubuhi korban yang bernama Rosalia Cici M. Siahaan, dengan melakukan pembunuhan terlebih dahulu. Pembunuhan dilakukan dengan menusukkan pisau ke leher korban sebanyak 3 kali. Setelah badan korban tak lagi bernyawa, korban dibawa ke kamar mandi di gereja setempat. Setelah itu, segala pakaian di tubuh mayat korban dilepaskan oleh pelaku dan mayat korban langsung disetubuhi.¹²
3. Di Palembang, perbuatan nekrofilia yang menimpa mayat seorang dokter bernama Alia yang dilakukan kekasihnya. Menurut pengakuan pelaku, pelaku melakukan pemerkosaan terhadap mayat si dokter setelah melakukan pembunuhan terlebih dahulu. Motif dari pembunuhan tersebut dikarenakan penolakan ajakan menikah dari pelaku. Mayat dokter tersebut ditemukan telah membusuk di dalam sebuah mobil sedan. Lalu, dilakukan otopsi terhadap mayat si dokter dan ditemukan darah mengucur dari alat vital si dokter.¹³

Beberapa kasus yang telah dijabarkan di atas merupakan kasus pembunuhan yang sudah diputus oleh pengadilan karena dibarengi tindak pidana lain. Hakim yang mengadili perkara tersebut memutuskan bahwa pelaku telah melakukan tindak pidana pembunuhan baik biasa atau berencana. Sanksi yang dijatuhkan berupa pidana penjara seumur hidup atau 15 tahun. Namun, ada hal yang patut dipersoalkan di mana pelaku melakukan perbuatan keji yaitu menyetubuhi mayat korban. Hal ini menjadi persoalan ketika putusan pengadilan yang dijatuhkan tidak pernah mempertimbangkan hukuman atas perbuatan menyetubuhi mayat korban yang dilakukan oleh pelaku. Sebab, sangat sulit untuk menjerat pelaku karena tidak ada aturan normatif yang melarang secara jelas tentang persetubuhan terhadap mayat. Padahal dalam *ratio decidendi* dalam putusan *a quo* telah mengakui bahwa tindakan persetubuhan maupun kekerasan terhadap mayat termasuk kejahatan yang tidak berperikemanusiaan.¹⁴

Di Indonesia, banyak kasus-kasus persetubuhan terhadap mayat yang tidak diselidiki oleh aparat penegak hukum karena dianggap merupakan perbuatan yang motifnya tidak jelas dan terkesan diabaikan sehingga para pelaku lolos dari jerat hukum. Seperti kasus yang terjadi pada mayat seorang gadis SMP di Deli Serdang, di mana baru dimakamkan selama satu hari ternyata mayat gadis tersebut mendapatkan pelecehan seksual oleh dua orang pria. Mayat tersebut disetubuhi dan ditemukan telah dikeluarkan dari kuburannya dalam keadaan telanjang pada 27 Maret 2013 di Deli

¹⁰ Elza Deswira Pratiwi dan Gelar Ali Ahmad, *Op. Cit.*, hlm. 139.

¹¹ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 58/Pid.B/2010/PN Jkt.Tim, diolah pada tanggal 20 Januari 2025.

¹² Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2022/Pid.B/2018/PN Lbp, diolah pada tanggal 21 Januari 2025.

¹³ Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1842/Pid.B/2009/PN Plg, diolah pada tanggal 22 Januari 2025.

¹⁴ Elza Deswira Pratiwi dan Gelar Ali Ahmad, *Loc. Cit.*

Serdang. Polisi tak melanjutkan proses hukum karena menganggap tidak ada motif yang jelas meskipun pelaku mengakui bahwa perbuatannya didasari pada kebiasaan menonton film dewasa sehingga timbul rasa penasaran untuk mencoba berhubungan seksual dengan mayat. Selain itu, ditemukan bukti berupa bekas tapak tangan di tubuh mayat serta hasil visum yang menunjukkan ada bekas luka di alat kelamin mayat tersebut.¹⁵ Namun, penulis menilai bahwa kasus di atas dapat dianggap sebagai tindak pidana dan dapat pelakunya dapat dijerat dengan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 271 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang akan berlaku pada tahun 2026 nanti.

Jika mengutip pendapat **K. W. Simons** yang mengatakan bahwa tindak pidana diartikan sebagai suatu bentuk pelanggaran terhadap norma hukum yang sengaja maupun tidak sengaja dilakukan, yang terhadap tindakan tersebut dapat dipertanggungjawabkan,¹⁶ maka sesungguhnya perbuatan dalam kasus di atas dapat diartikan sebagai tindak pidana. Hal ini dikarenakan perbuatan dalam kasus di atas telah melanggar ketentuan hukum dalam peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 271 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Selain itu, jika ditelaah dalam kasus di atas, pelaku melakukan perbuatannya dengan niat jahat, sengaja dan dalam kesadaran penuh. Lalu, perbuatan yang dilakukan pelaku merupakan sesuatu yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena tidak pelaku tidak memiliki gangguan kejiwaan sehingga dapat dipersalahkan serta tidak terdapat alasannya hapusnya suatu pidana. Dengan demikian, penulis dapat menyimpulkan bahwa perbuatan pelaku di atas merupakan suatu tindak pidana dan dapat dijerat pidana kepada pelakunya.

Selanjutnya, dalam tindak pidana terdapat unsur-unsur agar suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana. Unsur-unsur tersebut terdiri dari unsur subjektif (unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku dan termasuk segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya) dan unsur objektif (unsur-unsur yang ada di dalam keadaan-keadaan di mana tindakan dari pelaku itu harus dilakukan).¹⁷ Unsur subjektif dalam kasus di atas merupakan pelaku yang melakukan perbuatan nekrofilia. Perbuatan pelaku merupakan sesuatu yang dapat dipersalahkan padanya karena pelaku memiliki niat jahat dengan sengaja untuk melakukan perbuatan nekrofilia. Selain itu, pelaku tidak memiliki riwayat gangguan kejiwaan (gila) sehingga pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana dan unsur subjektif dianggap terpenuhi.

Sedangkan dalam unsur objektif, terdiri dari perbuatan pelaku yaitu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 271 UU No. 1 tahun 2023 tentang KUHP yang menyebutkan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum menggali atau membongkar makam, mengambil, memindahkan, atau mengangkut jenazah, dan/atau memperlakukan jenazah secara tidak beradab, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.¹⁸ Melihat bunyi Pasal 271 di atas, maka pelaku dianggap telah memenuhi unsur objektif dikarenakan jelas dikatakan bahwa perbuatan pelaku merupakan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan hukum pidana yaitu melakukan persetubuhan terhadap mayat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seluruh unsur-unsur dalam tindak pidana telah terpenuhi dan perbuatan pelaku yang menyetubuhi mayat dapat dikatakan merupakan suatu tindak pidana dan pelaku dapat dijerat dengan pidana.

Selanjutnya, penulis akan menganalisis kasus di atas dengan menggolongkan perbuatan tersebut ke dalam jenis-jenis tindak pidana sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan KUHP, perbuatan dalam kasus di atas disebut sebagai tindak pidana yaitu tindak pidana yang di atur dalam Pasal 271 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Hal ini dikarenakan UU No 1. Tahun 2023 tentang KUHP tidak lagi dikenal istilah kejahatan dan pelanggaran melainkan hanya tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana.¹⁹

¹⁵ <https://www.news.detik.com/berita/d-2295173/>, berita, detik.com, *Kuburuan ABG Dibongkar Sosok Misterius Warga Deli Serdang Geger*, diakses pada tanggal 23 Januari 2025.

¹⁶ Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 23.

¹⁷ Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012, hlm. 45.

¹⁸ Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Loc. Cit.*

¹⁹ Penjelasan Atas UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Op. Cit.*, hlm. 5.

2. Bahwa berdasarkan cara merumuskannya yang terdiri dari delik formil dan delik materiil²⁰, perbuatan dalam kasus di atas digolongkan sebagai delik formil karena perbuatan pelaku dianggap telah memenuhi ketentuan hukum dan dianggap sebagai tindak pidana tanpa perlu memandang akibat dari perbuatan tersebut.
3. Bahwa berdasarkan bentuk kesalahannya yang terdiri dari delik *dolus* dan delik *culpa*²¹, perbuatan yang dilakukan pelaku digolongkan sebagai delik *dolus* karena pelaku memiliki niat jahat dengan sengaja untuk menghendaki dan mengetahui menyetubuhi mayat korban.
4. Bahwa berdasarkan macam perbuatannya,²² perbuatan yang dilakukan pelaku digolongkan ke dalam delik aktif dikarenakan pelaku melakukan perbuatan menyetubuhi mayat korban sebagai sesuatu yang dilarang oleh ketentuan hukum.
5. Berdasarkan sumbernya,²³ perbuatan pelaku dapat digolongkan ke dalam delik umum dikarenakan perbuatan tersebut dilarang menurut ketentuan hukum di dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
6. Berdasarkan subjek hukumnya,²⁴ perbuatan pelaku dapat digolongkan ke dalam tindak pidana *omnium* dikarenakan perbuatan tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang dan siapa saja bukan pada kualitas tertentu seseorang.
7. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan²⁵, perbuatan pelaku dapat digolongkan ke dalam delik biasa dikarenakan penuntutan terhadap perbuatan pelaku tidak harus didahului dengan adanya pengaduan dari pihak terkait.
8. Berdasarkan berat dan ringannya pidana pokok yang diancamkan,²⁶ perbuatan pelaku tergolong ke dalam delik ringan dikarenakan bentuk tindak pidana yang paling sederhana, tanpa adanya unsur bersifat memberatkan sehingga tidak adanya pemberatan sanksi.
9. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi,²⁷ perbuatan pelaku dapat digolongkan ke dalam tindak pidana yang mencederai kepentingan hukum dari ketertiban dan keamanan umum khususnya kepentingan pemakaman dan jenazah sebagaimana di dalam Bagian Keempat Paragraf 9 KUHP baru.
10. Berdasarkan dari sudut berapa kali perbuatan menjadi suatu larangan²⁸, perbuatan pelaku tergolong ke dalam tindak pidana tunggal dikarenakan dengan satu kali saja, perbuatan pelaku sudah dapat dikatakan sebagai tindak pidana dan dapat dipidana.

Kemudian, penulis akan menggolongkan perbuatan nekrofilia yang dilakukan oleh pelaku ke dalam jenis-jenis nekrofilia. Mengutip pendapat **Jonanthan Rosman** dan **Philip Resnick**, maka perbuatan nekrofilia masuk ke dalam jenis nekrofilia yaitu *Regular Necrophilia* dikarenakan pelaku menggunakan mayat yang telah ada dengan cara menggali kuburan untuk menyalurkan kepuasan seksual dengan menyetubuhi mayat tersebut.²⁹ Sedangkan dalam pendapat **Anggi Anggrawal**, dapat dikatakan bahwa perbuatan nekrofilia yang dilakukan oleh pelaku termasuk ke dalam klasifikasi yaitu kelas ke VIII (Nekrofilia Reguler), di mana pelaku sangat menikmati berhubungan intim dengan mayat dan kurang menikmati seks dengan orang hidup. Hal tersebut diketahui berdasarkan

²⁰ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 60.

²¹ *Ibid.*

²² Mohammad Ekaputra, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Edisi 2*, USU Press, Medan, 2015, hlm. 102.

²³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, *Loc. Cit.*

²⁴ *Ibid.*, hlm. 61.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 64.

²⁶ Mohammad Ekaputra, *Op. Cit.*, hlm. 105.

²⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 135.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 136.

²⁹ <https://www.halodoc.com/artikel>, artikel, Halodoc, *Yang Perlu Diketahui Tentang Penyimpangan Seksual Nekrofilia*, Diakses pada tanggal 26 Januari 2025.

keterangan yang di dapat dari pelaku sendiri bahwa pelaku tidak berniat untuk menyetubuhi orang hidup melainkan kepada orang yang sudah meninggal (mayat).³⁰

Kemudian, penulis akan meninjau kasus di atas dengan ketentuan hukum yang tertuang di dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP. UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengatur kejahatan terhadap mayat dalam Bagian Keempat, Paragraf 9 tentang tindak pidana gangguan terhadap pemakaman dan jenazah yaitu dari Pasal 268 sampai dengan Pasal 271. Namun, penulis menilai bahwa perbuatan pelaku dalam kasus di atas dapat dikenakan Pasal 271. Untuk membuktikannya, penulis mengutip pendapat **Didik Endro Purwoleksono**, salah satu metode untuk merumuskan suatu tindak pidana adalah dengan menjelaskan dan menyebutkan satu per satu unsur-unsur tindak pidana tersebut secara terperinci.³¹ Oleh karena itu, untuk mengetahui apakah rumusan Pasal 271 dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP dapat menjerat persetujuan terhadap mayat, maka penulis akan menguraikan unsur-unsur Pasal 271 tersebut.

Berdasarkan rumusan dalam Pasal 271, maka terdapat beberapa unsur yang membentuknya sebagai suatu tindak pidana yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Setiap orang

Dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, setiap orang merupakan unsur pelaku atau subjek dari tindak pidana (delik). Dengan menggunakan kata setiap orang berarti pelakunya adalah dapat siapa saja, siapa pun dapat menjadi pelaku. Dalam sistem KUHP yang baru, yang dapat menjadi subjek tindak pidana (pelaku) bukan hanya manusia saja melainkan juga termasuk korporasi. Dengan diadopsinya paham korporasi adalah subjek tindak pidana, maka korporasi baik yang berstatus berbadan hukum maupun bukan berbadan hukum dianggap bisa melakukan sebuah tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana.³² Oleh karena itu, setiap orang atau siapa saja yang melakukan tindakan persetujuan terhadap mayat maka dapat dianggap sebagai pelaku dalam tindak pidana.

Berkaitan dengan unsur setiap orang sebagai unsur subjektif dalam tindak pidana, maka perlu dilihat juga terkait unsur kesalahan yang terdapat dari pelaku. Unsur kesalahan berkaitan dengan perbuatan pelaku dilakukan dengan adanya kesengajaan. Berdasarkan kasus di atas, pelaku dengan jelas melakukan perbuatannya dengan sengaja yaitu berarti dengan maksud untuk melakukan persetujuan terhadap mayat secara melawan hukum. Selain itu, pelaku tidak memiliki gangguan kejiwaan sehingga menurut hukum pidana, pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 36 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Dengan demikian, pelaku dalam kasus di atas dapat dianggap telah memenuhi unsur setiap orang.

2. Secara melawan hukum

Berdasarkan pendapat **Moeljatno** yang menganut ajaran melawan hukum materiil, dengan mengakui bahwa sifat melawan hukum selalu menjadi unsur perbuatan pidana, dan harus dibuktikan jika disebutkan secara nyata dalam pasal, maka unsur secara melawan hukum dalam Pasal 271 UU No. 1 Tahun 2023 harus dibuktikan.³³ Untuk membuktikan hal tersebut, penulis mengutip pendapat **Rosa Agustina** merumuskan perbuatan melawan hukum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:³⁴

- 1) Perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- 2) Perbuatan tersebut bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
- 3) Perbuatan tersebut bertentangan dengan kesusilaan; dan

³⁰ A. Anggrawal, *A New Classification of Necrophilia*, Journal of Forensic and Legal Medicine, Elsevier, Vol. 16, No. 6, 2009, hlm. 316-320.

³¹ Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya, 2016, hlm. 78.

³² Penjelasan Atas UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hlm. 6.

³³ *Ibid.*

³⁴ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 17.

4) Perbuatan tersebut bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

Berdasarkan pendapat di atas, maka perbuatan pelaku yang menyetubuhi mayat korban merupakan bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku. Hal ini dikarenakan pelaku merupakan orang yang tidak memiliki kompetensi atau kewenangan untuk melakukan penggalian atau pembongkaran makam, mengambil, memindahkan, atau mengangkut mayat. Selain itu, perbuatan pelaku tersebut bertentangan dengan hak orang lain, sebab mayat merupakan sesuatu objek yang melekat kepemilikannya terhadap ahli waris dari mayat tersebut. Mayat dalam kasus di atas, bukanlah sesuatu kepemilikan dari pelaku sehingga pelaku tidak memiliki hak untuk menguasai mayat tersebut. Kemudian, perbuatan pelaku juga dikatakan sebagai hal yang bertentangan dengan kesusilaan, sebab pelaku menyetubuhi mayat yang mana perbuatan menyetubuhi baik kepada orang yang masih hidup maupun sudah meninggal adalah melanggar norma kesusilaan dalam kehidupan masyarakat. Terakhir, perbuatan pelaku juga melanggar kepatutan, sebab pelaku melakukan perbuatan tercela yang melukai dan membuat rasa takut terhadap kehidupan masyarakat.

Pasal 12 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP menyatakan bahwa untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, suatu perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan oleh peraturan perundang-undangan harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.³⁵ Selain itu, hal tersebut diperkuat kembali dengan pendapat **Eddy OS Hiariej** yang menyatakan bahwa pemahaman terhadap asas legalitas sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 dan 2 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP menunjukkan bahwa secara implisit hukum pidana di Indonesia telah mengakui ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsi yang positif. Artinya, meskipun suatu perbuatan tidak memenuhi rumusan delik dalam hukum tertulis, hakim dapat menjatuhkan pidana apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, bertentangan dengan keadilan dan norma-norma sosial lainnya dalam kehidupan masyarakat.³⁶

Oleh karena itu, perbuatan pelaku yang menyetubuhi mayat dapat dinilai sebagai sebuah tindakan yang melawan hukum secara materiil dan memenuhi unsur di atas, dikarenakan tindakan tersebut dianggap bertentangan dengan hukum tidak tertulis yaitu hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Buktinya adalah bahwa tindakan tersebut melanggar baik kehormatan jenazah maupun kehormatan ahli warisnya. Apabila dilihat di Indonesia sendiri, dari suku, agama dan ras manapun bahkan dalam KUHP perbuatan persetubuhan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Selain itu, manusia yang telah meninggal masih mempunyai hak secara religi, baik perdata maupun pidana. Dalam hukum pidana, delik-delik yang bersangkutan dengan jenazah disebut termasuk delik yang berhubungan dengan agama dan dinamakan dengan *grabdelikte* dan *leinchenfrevel* dan mengenai pelanggaran terhadap pertemuan keagamaan.³⁷

3. Menggali atau membongkar makam

Unsur ini merupakan bagian dari perbuatan yang dilarang dan dianggap bertentangan dengan hukum. Perbuatan menggali atau membongkar makam merupakan suatu upaya membuat lubang atau merusak keutuhan makam dengan tujuan untuk menguasai jenazah atau sesuatu yang ada di dalam makam tersebut.³⁸ Perbuatan menggali atau membongkar makam tersebut dikategorikan sebagai delik agama. Perbuatan menggali atau membongkar makam dilarang oleh hukum karena sebagai bentuk perlindungan hukum negara terhadap nilai-nilai sosial dan agama serta penghormatan kepada tempat-tempat yang dihormati atau dihargai masyarakat, juga diharapkan dapat menjadi upaya preventif agar masyarakat tidak

³⁵ *Ibid*, hlm. 7.

³⁶ Eddy O.S Hiariej, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2009, hlm. 39-40.

³⁷ Oemar Seno Adji, *Hukum Pidana Pengembangan*. Penerbit Erlangga, Jakarta, 2013, hlm. 127.

³⁸ S. R. Sianturi, *Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983, hlm. 271.

melakukannya dan memiliki efek jera bagi para pelakunya.³⁹ Dengan demikian, perbuatan pelaku yang menyetubuhi mayat dianggap telah memenuhi unsur di atas, sebab dilakukan dengan menggali atau membongkar makam terlebih dahulu.

4. Mengambil, memindahkan, atau mengangkut jenazah

Unsur ini terdiri dari perbuatan yang dilarang menurut ketentuan hukum yaitu mengambil yang berarti membawa jenazah dengan melanggar hak atau perbuatan yang lebih luas, sebab mampu mencakup perbuatan pelaku yang mengambil jenazah secara melawan hukum dari perumahan jenazah atau persemayaman jenazah sebelum diadakan kremasi ataupun jenazah yang masih ada di rumah sakit.⁴⁰ Kemudian, perbuatan memindahkan atau mengangkut menunjukkan bahwa pelaku telah melakukan tindak lanjut terhadap jenazah yang telah digali atau diambil dengan meletakkan jenazah ke tempat lain dengan melanggar hak. Oleh karena itu, perbuatan pelaku yang mengambil, memindahkan atau mengangkut mayat dengan melanggar hak telah memenuhi unsur di atas.

5. Memperlakukan jenazah secara tidak beradab

Unsur memperlakukan jenazah secara tidak beradab mencakup perilaku yang menghina, merusak, atau tidak menghormati jenazah dengan cara yang tidak pantas. Berbagai nilai budaya dan norma agama yang di Indonesia mengajarkan suatu penghormatan dan etika dalam memperlakukan jenazah. Misalnya, merendahkan, merusak, atau merampas jenazah, atau melakukan tindakan tidak patut terhadap jenazah termasuk menyetubuhi jenazah, semuanya dapat dianggap sebagai tindakan tidak beradab. Persetubuhan terhadap jenazah merupakan tindakan yang sangat tidak bermoral dan melanggar hak serta martabat jenazah.⁴¹ Dalam kasus di atas, pelaku mengakui bahwa memiliki kebiasaan menonton film dewasa yang akhirnya menimbulkan rasa penasaran untuk berhubungan seksual dengan mayat. Hal ini yang menyebabkan munculnya niat pelaku untuk melakukan secara sengaja perbuatan yang tidak beradab yaitu menyetubuhi jenazah. Dengan demikian, sedari awal pelaku telah memiliki niat yang jahat dengan mengesampingkan adab dalam memperlakukan jenazah sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa dari niat pelaku menyebabkan perbuatannya dapat dipersalahkan kepadanya dan unsur di atas dianggap telah terpenuhi.

Berdasarkan analisis di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa perbuatan pelaku dalam kasus penemuan mayat di Deli Serdang di atas telah memenuhi semua unsur sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 271 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP yaitu melakukan pembongkaran makam, pemindahan dan persetubuhan mayat sehingga perbuatan pelaku dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana dan kepada pelaku dapat dijerat dengan pidana berupa pidana penjara maksimal 2 tahun atau pidana denda maksimal kategori III.

4. KESIMPULAN

Kasus penemuan mayat di Deli Serdang yang dibahas di atas dapat dikatakan sebagai tindak pidana dan dapat dijerat dengan pidana kepada pelakunya. Hal ini didasari atas analisis yang dilakukan oleh penulis melalui beberapa pendekatan yaitu pendapat para ahli (pendapat **K. W. Simons**), unsur-unsur dalam tindak pidana yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif, jenis-jenis tindak pidana yang terdiri dari 10 jenis serta jenis-jenis nekrofilia menurut **Jonanthan Rosman** dan **Philip Resnick** dan **Anggi Anggrawal** yang mana semua hal tersebut membuktikan bahwa perbuatan pelaku dalam kasus yang dibahas merupakan suatu perbuatan pidana. Selain itu, penulis mengkualifikasikan perbuatan pelaku dalam kasus di atas sebagai tindak pidana sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 271 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Hal tersebut dikarenakan perbuatan pelaku yang melakukan penggalian dan pembongkaran makam, mengangkut dan menyetubuhi mayat telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 271 yang terdiri dari unsur setiap orang, unsur

³⁹ <https://fh.ubb.ac.id/opini>, opini, Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, *Yang Perlu Diketahui Tentang Penyimpangan Seksual Nekrofilia*, Diakses pada tanggal 28 Januari 2025.

⁴⁰ S. R. Sianturi, *Op.Cit.*, hlm. 272.

⁴¹ Elza Deswira Pratiwi dan Gelar Ali Ahmad, *Op.Cit.*, hlm. 140.

menggali atau membongkar makam, unsur mengambil, memindahkan atau mengangkut jenazah serta unsur memperlakukan jenazah secara tidak beradab. Oleh karena itu, pelaku dapat dikenakan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 271 yaitu pidana penjara maksimal 2 tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.

REFERENCES

- Nursariani Simatupang dan Faisal, *Kriminologi*, Pustaka Prima, Medan, 2017.
- Ridwan Arifin dan Arsitasi Dewi Fatasya, *Kajian Hukum Atas Pembunuhan Berencana Yang Disertai Penganiayaan dan Mutilasi (Studi Atas Kasus-Kasus Mutilasi Kontroversi Di Indonesia)*, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 8, No. 1, 2019.
- Kowland Hawary, *Gagasan Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Perkosaan Mayat (Nekrofilia) Dalam Hukum Positif Indonesia*, Jurnal Online Mahasiswa, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol.1, No. 2, 2019.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, PT Gramedia Utama, Jakarta, 2012.
- Jaymin Choolert, *Problem about the Enforcement on the Act of Sexual Penetration and Sexual Conduct: Study in Caases of Schizophrenia, The Type of Sexual Encounter with a Corpse*, Nitipat Law Journal, National Institute of Development Administration, Vol. 10, No.1, 2021.
- Elza Deswira Pratiwi dan Gelar Ali Ahmad, *Analisis Yuridis Tindakan Perkosaan Terhadap Jenazah di Indonesia*, Novum: Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya, In Press SPK 20, 2024.
- Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Penjelasan Atas UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 58/Pid.B/2010/PN Jkt.Tim, diolah pada tanggal 25 november 2024.
Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2022/Pid.B/2018/PN Lbp, diolah pada tanggal 26 november 2024.
Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1842/Pid.B/2009/PN Plg, diolah pada tanggal 24 November 2024.
- <https://www.news.detik.com/berita>, berita, detik.com, *Kuburuan ABG Dibongkar Sosok Misterius Warga Deli Serdang Geger*, diakses pada tanggal 23 Januari 2025.
- Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011..
- Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Mohammad Ekaputra, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Edisi 2*, USU Press, Medan, 2015.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- <https://www.halodoc.com/artikel>, artikel, Halodoc, *Yang Perlu Diketahui Tentang Penyimpangan Seksual Nekrofilia*, Diakses pada tanggal 26 Januari 2025.
- A. Anggrawal, *A New Classification of Necrophilia*, Journal of Forensic and Legal Medicine, Elsevier, Vol. 16, No. 6, 2009.
- Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya, 2016.
- Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2003.
- Eddy O.S Hiariej, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2009.
- Oemar Seno Adji, *Hukum Pidana Pengembangan*. Penerbit Erlangga, Jakarta, 2013.
- S. R. Sianturi, *Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.
- <https://fh.ubb.ac.id/opini>, opini, Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, *Yang Perlu Diketahui Tentang Penyimpangan Seksual Nekrofilia*, Diakses pada tanggal 28 Januari 2025.